

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan merupakan penyelenggaraan peradilan. Atau dengan perkataan lain, pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹ Peradilan agama adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.² Hal ini sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"

Menurut Royhan A. Rasyid menyatakan bahwa peradilan agama adalah salah satu dari Peradilan Negara di Indonesia yang bersifat khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam bagi orang-orang beragama Islam.³ Kemudian dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama berbunyi " Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini"

¹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 6.

² Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 20.

³ Royhan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm. 5

Adapun yang dimaksud dengan perkara tertentu di jelaskan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah". Termasuk di dalamnya kewenangan mengenai perkara permohonan itsbat nikah.

Kemudian dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa "Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding". Dan dalam ayat (2) pada pasal ini juga menyebutkan bahwa "Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya". Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding disebut *judex facti* artinya pemeriksaan perkara pada tingkat banding dilakukan secara keseluruhan sebagaimana dalam pemeriksaan tingkat pertama.⁴ Adanya tingkatan dalam peradilan agama ini kemungkinan menyebabkan terjadinya perbedaan hasil keputusan yang dijatuhkan atas perkara yang diajukan.

Produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yaitu berupa keputusan pengadilan. Menurut ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dapat diketahui bahwa terdapat dua bentuk produk keputusan yang dikeluarkan oleh Peradilan Agama yaitu penetapan

⁴ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 36.

dan putusan. Dalam penjelasan Pasal 60 tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan, sedangkan putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.

Adapun menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁵ Sedangkan menurut Abdul Manan menyatakan bahwa putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.⁶ Selanjutnya menurut A. Mukti Arto memberikan definisi putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.⁷

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan serta pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili seperti yang tercantum dalam Pasal 62 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dalam pengertian yang luas, bukan hanya sekedar meliputi motivasi

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta:Liberty Yogyakarta, 2009) hlm. 212

⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2000) hlm. 173

⁷ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) hlm. 245

pertimbangan hukum tentang alasan-alasan dan dasar-dasar hukum serta pasal-pasal peraturan yang bersangkutan, tetapi juga meliputi sistemastika, argumentasi, dan kesimpulan yang terang dan mudah dimengerti orang yang membacanya.⁸ Jadi hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusannya.

Putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu diperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*), dan kepastian (*rechtsecherheit*).⁹ Ketiga hal ini harus mendapat perhatian yang seimbang secara profesional, meskipun dalam praktek sangat sulit untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, hakim harus berusaha semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan itu mengandung asas tersebut, sehingga tidak terdapat putusan hakim yang akan menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi para pencari keadilan.

Pada Tahun 2014, Pengadilan Agama Bogor telah menerima, memutus dan menyelesaikan salah satu perkara yaitu mengenai permohonan itsbat nikah. Perkara permohonan itsbat nikah tersebut yaitu permohonan itsbat nikah poligami yang diajukan oleh Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II sebagai istri kedua melawan Termohon sebagai istri pertama, yang mana Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan, namun pada saat itu Pemohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan Termohon dan perkawinan Para Pemohon tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA setempat. Perkara

⁸ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 313

⁹ Abdul Manan, *Loc. Cit.*

permohonan itsbat nikah tersebut telah terdaftar dalam buku register Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 01 September 2014. Atas perkara tersebut Pengadilan Agama Bogor telah memeriksa, mengadili, dan mengeluarkan putusannya dengan Nomor 925/Pdt.G/2014/PA.Bgr Tentang Permohonan Itsbat Nikah.

Perkara permohonan itsbat nikah ini diputus pada tanggal 22 Oktober 2014 oleh majelis hakim pada tingkat pertama dengan menyatakan menolak permohonan itsbat nikah yang diajukan Para pemohon dan menyatakan tidak sah perkawinan antara Para Pemohon. Kemudian para pemohon merasa tidak puas sehingga mengajukan banding atas perkara tersebut kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Di tingkat Pengadilan Tinggi Agama, majelis hakim pada tingkat banding memiliki pendapat yang berbeda dari majelis hakim pengadilan tingkat pertama. Menurut pendapat majelis hakim pada tingkat banding bahwa permohonan itsbat nikah tersebut dapat dikabulkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Agama Bandung melakukan pembatalan terhadap putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 925/Pdt.G/2014/PA.Bgr Tentang Permohonan Itsbat Nikah dengan mengadili sendiri yaitu mengabulkan permohonan Para Pemohon dan menyatakan bahwa pernikahan antara Para Pemohon adalah sah.

Dari kedua putusan tersebut dapat diklasifikasikan mengenai amar putusan yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 925/Pdt.G/2014/PA.Bgr dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 12/Pdt.G/2015/PTA.Bdg dalam sebuah tabel sebagai berikut:

Tabel 1.
Amar Putusan Tentang Permohonan Itsbat Nikah

Nomor 925/Pdt.G/2014/PA.Bgr	Nomor 12/Pdt.G/2015/PTA.Bdg
1. Menolak Permohonan Para Pemohon	1. Menyatakan permohonan banding
2. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000	Pembanding formal dapat diterima
	2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 925/Pdt.G/2014/PA.Bgr
	3. Menerima permohonan Pemohon I dan Pemohon II
	4. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II
	5. Menolak selain dan selebihnya
	6. Menghukum Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000

Berdasarkan uraian tersebut, telah terjadi disparitas putusan antara putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 925/Pdt.G/2014/PA.Bgr dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 12/Pdt.G/2015/PTA. Bdg Tentang Permohonan Itsbat Nikah. Oleh karena itu, penulis tertarik menganalisis putusan ini mengenai apa yang menjadi pertimbangan hakim dan landasan hukum hakim maupun metode penemuan hukum yang digunakan hakim dalam kedua putusan tersebut sehingga terjadi perbedaan dalam amar putusannya.

B. Rumusan Masalah

Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 925/Pdt.G/2014/PA.Bgr dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 12/Pdt.G/2015/PTA.Bdg Tentang Permohonan Itsbat Nikah ditemukan adanya disparitas dalam amar putusannya yaitu majelis hakim pada tingkat pertama menolak permohonan pemohon, sedangkan majelis hakim pada tingkat banding mengabulkan permohonan pemohon. Berdasarkan hal itu diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam putusan Nomor 925/Pdt.G/2014/PA.Bgr dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam putusan Nomor 12/Pdt.G/2015/PTA.Bdg?
2. Apa yang menjadi landasan hukum hakim Pengadilan Agama dalam putusan Nomor 925/Pdt.G/2014/PA.Bgr dan landasan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam putusan nomor 12/Pdt.G/2015/PTA.Bdg?
3. Apa yang menjadi metode penemuan hukum hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dalam putusan Nomor 925/Pdt.G/2014/PA.Bgr dan Nomor 12/Pdt.G/2015/PTA.Bdg?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengenai putusan permohonan itsbat nikah ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam putusan Nomor 925/Pdt.G/2014/PA.Bgr dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam putusan Nomor 12/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.

2. Untuk mengetahui landasan hukum hakim Pengadilan Agama dalam putusan Nomor 925/Pdt.G/2014/PA.Bgr dan landasan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam putusan nomor 12/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.
3. Untuk mengetahui metode penemuan hukum hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dalam putusan Nomor 925/Pdt.G/2014/PA.Bgr dan Nomor 12/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, sebagai berikut:

1. Hasil penelitian diharapkan menarik minat peneliti lain, khususnya di kalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau yang serupa.
2. Hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah dibidang Hukum Islam dan Pranata Sosial, khususnya dalam penemuan dan penerapan hukum serta nilai-nilai hukum dalam produk pengadilan terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini dititikberatkan pada pembahasan isi putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 925/Pdt.G/2014/PA.Bgr dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 12/Pdt.G/2015/PTA.Bdg Tentang Permohonan Itsbat Nikah, dalam hal ini putusan (*vonnis* atau *al-qadha*) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht*).

Keputusan pengadilan agama terdiri atas putusan (*vonnis* atau *al-qadha*) dan penetapan (*beschikking* atau *al-itsbat*). Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan (*contentiosa*) berdasarkan adanya suatu sengketa atau perselisihan dan bersifat menghukum (*condemnatoir*). Sedangkan penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*) atau perkara yang tidak ada sengketa dan bersifat menetapkan (*declaratoir*). Hal tersebut terdapat dalam penjelasan pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹⁰

Putusan pengadilan memiliki enam unsur yang saling berhubungan satu sama lain yaitu: sumber hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan, sumber hukum tidak tertulis, antara lain al-Qur'an, kitab hadits, dan kitab fiqh, hukum tertulis yakni kaidah hukum dalam pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis yakni doktrin ahli hukum dan pendapat fuqaha, pemeriksaan perkara sesuai dengan prosedur peradilan, putusan pengadilan yang berupa naskah yang berkekuatan hukum tetap.¹¹

Putusan pengadilan memiliki dimensi ganda. Putusan pengadilan merupakan wujud penerapan hukum tertulis dan tidak tertulis dalam peristiwa hukum yang kongkrit, yaitu perkara. Putusan juga merupakan wujud penggalian dan penemuan hukum oleh hakim yang memiliki kewajiban untuk melakukan

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Loc.Cit*

¹¹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 46.

ijtihad. Adapun dalam proses pengambilan keputusannya, hakim sebagai penegak hukum memiliki kewajiban untuk menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini bertujuan untuk melahirkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.¹²

Jadi hakim dalam mengambil keputusan tidak hanya melakukan penerapan hukum tetapi juga dapat melakukan penemuan hukum atau ijtihad yang mana penemuan hukum tersebut dapat dijadikan yurisprudensi bagi hakim lainnya. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum yang umum pada peristiwa hukum yang konkrit, dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das solen*) yang umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (*das sein*) tertentu.¹³

Secara umum dikenal ada dua jenis metode penemuan hukum yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi. Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Rifai, interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan alasan gamblang tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-

¹² Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 249.

¹³ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 410.

undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu.¹⁴ Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkret. Sedangkan menurut Ahmad Ali sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Manan, mengatakan bahwa metode konstruksi mempergunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.¹⁵

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Metode analisis isi (*content analysis*) yaitu metode penelitian yang biasanya digunakan untuk penelitian pemekiran yang bersifat normatif dengan cara menganalisis terhadap suatu putusan Pengadilan atau Yurisprudensi dengan cara penafsiran isi putusan yang lazim digunakan dalam ilmu hukum.¹⁶ Dalam hal ini analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Bogor nomor 925/Pdt.G/2014/PA.Bgr dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung nomor 12/Pdt.G/2015/PTA.Bdg tentang permohonan itsbat nikah. Metode penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti mengenai apa

¹⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm. 61.

¹⁵ Abdul Manan, *Op.Cit*, hlm. 163

¹⁶ Cik Hasan Bisri, *Op.Cit*, hlm. 60

yang menjadi pertimbangan hakim, landasan hukum dan metode penemuan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berdasarkan sumber data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yaitu berupa data putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 925/Pdt.G/2014/PA.Bgr dan data putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 12/Pdt.G/2015/PTA.Bdg Tentang Permohonan Itsbat Nikah.

b. Data sekunder

Adapun data sekunder adalah sumber data yang diperoleh untuk melengkapi data primer. Data sekunder pada penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, kitab-kitab, jurnal, dan atikel yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu berupa:

a. Data tentang pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 925/Pdt.G/2014/PA.Bgr dan Nomor 12/Pdt.G/2015/PTA.Bdg Tentang Permohonan Itsbat Nikah.

- b. Data tentang landasan hukum dalam putusan Nomor 925/Pdt.G/2014/PA.Bgr dan Nomor 12/Pdt.G/2015/PTA.Bdg Tentang Permohonan Itsbat Nikah.
- c. Data tentang metode penemuan hukum dalam kedua putusan tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Dokumentasi

Pengumpulan data yang pertama dilakukan yaitu dengan mencari naskah putusan yang berupa salinan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 925/Pdt.G/2014/PA.Bgr dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 12/Pdt.G/2015/PTA.Bdg sebagai dokumen pengadilan dengan cara melakukan pencarian di website Direktori Putusan Mahkamah Agung.

- b. Pustaka

Studi pustaka yaitu pengumpulan data yang didapatkan dari bahan berupa buku-buku literatur, karya ilmiah, artikel atau bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Seleksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Dalam hal ini yaitu berupa salinan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 925/Pdt.G/2014/PA.Bgr dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 12/Pdt.G/2015/PTA.Bdg Tentang Permohonan Itsbat Nikah serta

data-data pendukung lainnya yaitu undang-undang, buku-buku literatur, karya ilmiah dan lain sebagainya.

- b. Kalsifikasi data dengan menelaah seluruh data dan mengklasifikasikan data dengan merujuk kepada kerangka berpikir dan tujuan penelitian dari data yang diperoleh.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka berpikir.
- d. Setelah melalui tahap tersebut, maka dapat diperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan dan ditarik kesimpulan terhadap data yang telah terkumpul.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG